

ECONOMIC DEVELOPMENT OF TRANSMIGRATION COMMUNITIES IN MUKTI SARI VILLAGE, TAPUNG DISTRICT, KAMPAR REGENCY (1988 – 2023)

Perkembangan Perekonomian Masyarakat Transmigrasi Di Desa Mukti Sari
 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar (1988 – 2023)

¹Tri Andini, ²Ahmal, ³Yuliantoro

¹²³Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Sejarah
 Kampus Bina Wydia Km. 12,5 Km, Pekanbaru

tri.andini1078@student.unri.ac.id
ahmal@lecturer.unri.ac.id
yuliantoro@lecturer.unri.ac.id

(¹)Coresspodence Author
tri.andini1078@student.unri.ac.id

How to Cite: Andini et al. (2026). Economic Development Of Transmigration Communities In Mukti Sari Village, Tapung District, Kampar Regency (1988 – 2023). doi: [10.36526/js.v3i2.6428](https://doi.org/10.36526/js.v3i2.6428)

<p>Received : 5-11-2026 Revised : 3-12-2025 Accepted : 13-03-2026</p> <p>Keywords: History, Sari Mukti Village, Transmigration, Community</p>	<p>Abstract This study discusses the Economic Development of the Transmigration Community in Mukti Sari Village, Tapung District, Kampar Regency (1988 - 2023). The purpose of this study is to determine the early history of arrival, Economic Improvement, the impact of the Independent Energy Village program on the economy and the Transmigration Community of Mukti Sari Village. This study uses a historical approach that includes the stages of heuristics, verification, interpretation, and historiography. This research was conducted in Mukti Sari Village, Tapung District, Riau Province. This study shows that the entry of people who participated in the transmigration program in Mukti Sari Village, Tapung District, Kampar Regency took place in 1988 when it was the New Order period which was included in Repelita IV. This is based on information provided by the first transmigration community who occupied the Mukti Sari village area which was still included in (UPT). Mukti Sari village is the oldest village, because in the village it was the first village to become a placement area for Transmigrants in 1988 and was the first transmigration unit. The current population of Mukti Sari village is approximately 5,000 people.</p>
---	---

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara moral maupun material. Dalam upaya tersebut, manusia senantiasa menginginkan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik, termasuk dalam bidang ekonomi. Menurut Chourmain dan Prihatin, perubahan dapat bersifat lambat atau cepat serta memiliki pengaruh yang terbatas maupun luas. Perubahan tersebut sering kali mencakup kemajuan dalam perencanaan pembangunan pedesaan dan peningkatan sistem perekonomian masyarakat. Munir dalam Wiyana menjelaskan bahwa peningkatan ekonomi dapat dilihat melalui arus perpindahan faktor produksi, pertukaran komoditas, informasi, dan mobilitas penduduk. Faktor-faktor ini menjadi indikator penting dalam menilai peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan pendapatan per kapita, ketersediaan sumber daya pembangunan, serta perbaikan sistem transportasi yang menunjang aktivitas ekonomi.

Salah satu bentuk upaya masyarakat untuk mencapai kesejahteraan ekonomi adalah melalui program transmigrasi. Transmigrasi merupakan kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memindahkan penduduk dari daerah padat seperti Pulau Jawa ke daerah yang masih jarang penduduknya, seperti Sumatera dan Kalimantan. Program ini dilatarbelakangi oleh ketimpangan distribusi penduduk serta ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah yang mengakibatkan munculnya berbagai masalah sosial dan ekonomi. Sejak awal kemerdekaan hingga

masa Reformasi, kesenjangan antarprovinsi terlihat jelas dalam hal tingkat pendidikan, pendapatan, serta infrastruktur ekonomi. Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pengembangan Pemukiman Transmigrasi menjelaskan bahwa transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan meningkatkan kesejahteraan para transmigran serta masyarakat sekitarnya. Dengan demikian, transmigrasi tidak hanya menjadi solusi demografis, tetapi juga instrumen pembangunan ekonomi yang strategis.

Program transmigrasi di Indonesia memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak masa kolonial Belanda dengan istilah *kolonisasi*. Setelah Indonesia merdeka, kebijakan ini dilanjutkan oleh pemerintah melalui beberapa periode, yaitu Orde Lama dan Orde Baru. Pada masa Orde Lama, fokus transmigrasi adalah pemerataan penduduk, tetapi hasilnya belum maksimal. Baru pada masa Orde Baru, program ini diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional dan regional. Pemerintah berperan aktif dalam menyiapkan lahan, menyediakan permukiman layak huni, serta memberikan pembinaan sosial dan ekonomi kepada masyarakat transmigran. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 menegaskan bahwa transmigrasi dilakukan secara sukarela dan diatur di bawah tanggung jawab pemerintah. Selain itu, dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993, transmigrasi diarahkan untuk pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan persatuan dan kesatuan bangsa. Program ini kemudian menjadi salah satu strategi utama dalam memperluas pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah Indonesia.

Pemerintah juga mendorong pengembangan transmigrasi berbasis *swakarsa* melalui kerja sama antara masyarakat dan perusahaan besar. Salah satu pola yang populer pada masa Orde Baru adalah *Perkebunan Inti Rakyat (PIR)*, yaitu sistem pengelolaan perkebunan yang memadukan peran perusahaan besar sebagai inti dengan masyarakat transmigran sebagai plasma. Pola PIR ini bertujuan meningkatkan produktivitas, pendapatan, serta kemandirian ekonomi masyarakat. Melalui sistem ini, transmigran mendapat lahan, bibit, pelatihan, dan jaminan pembelian hasil oleh perusahaan inti. Pola ini terbukti efektif dalam mengembangkan wilayah transmigrasi menjadi daerah pertanian dan perkebunan produktif. Selain itu, kebijakan pembangunan transmigrasi juga disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat agar kegiatan ekonomi dapat berkembang secara berkelanjutan. Dengan demikian, transmigrasi tidak hanya berperan dalam pemerataan penduduk, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam dan kerja sama lintas sector.

Program transmigrasi di Provinsi Riau telah dilaksanakan sejak tahun 1962, dimulai dengan pemukiman 58 keluarga di Kabupaten Kampar. Pada tahun 1988, pemerintah kembali menempatkan transmigran di wilayah ini, khususnya di Desa Mukti Sari, Kecamatan Tapung, sebagai bagian dari pelaksanaan *Repelita IV* di masa Orde Baru. Desa Mukti Sari menjadi unit transmigrasi pertama di Kabupaten Kampar dengan jumlah penduduk sekitar 5.000 jiwa. Para transmigran sebagian besar berasal dari Lampung, Jambi, dan Pulau Jawa. Pada awalnya, mereka memperoleh lahan dari pemerintah serta biaya hidup hingga perkebunan menghasilkan. Desa Mukti Sari semula dikenal sebagai Desa Gundaling dan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Transmigrasi (KUPT) yang bertanggung jawab dalam koordinasi dan distribusi bantuan. Dalam perkembangannya, wilayah ini menjadi salah satu contoh keberhasilan transmigrasi swakarsa pola PIR, terutama karena dukungan dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) sebagai perusahaan inti yang mengelola perkebunan kelapa sawit.

Kehadiran PTPN memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat transmigrasi di Desa Mukti Sari. Melalui pola kemitraan PIR, masyarakat memperoleh pendapatan tetap dari hasil perkebunan sawit serta dukungan fasilitas produksi. Hasilnya, masyarakat mengalami perubahan sosial ekonomi yang nyata, ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan, kepemilikan lahan, serta perbaikan kondisi infrastruktur desa. Banyak transmigran yang berhasil memiliki rumah permanen, kendaraan pribadi, dan usaha mandiri di sektor perdagangan maupun jasa. Desa Mukti Sari kini tumbuh menjadi wilayah yang produktif dan berdaya saing, dengan perekonomian yang semakin berkembang dari tahun ke tahun. Berdasarkan fakta tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai *Perkembangan Perekonomian*

Masyarakat Transmigrasi di Desa Mukti Sari, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar Tahun 1988–2023. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang dinamika pembangunan ekonomi di daerah transmigrasi serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

METODE

Dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Metode sejarah adalah sekumpulan prinsip atau aturan yang memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan data atau bahan-bahan bagi sejarah, menilai kritis dan kemudian menyajikan suatu thesis dan hasil-hasilnya dalam bentuk tertulis. Dari pemaparan yang telah di jelaskan di atas di ketahui bahwa sejarah memiliki empat metode di dalam penelitiannya yang ada di dalam penelitiannya di antara nya adalah: a. Heuristik, b. Verifikasi, c. Interpretasi, d. Historiografi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Awal Kedatangan Masyarakat Transmigrasi Desa Mukti Sari

Transmigrasi merupakan program nasional sebagai suatu usaha pemerataan distribusi penduduk di Indonesia dan pembangunan secara menyeluruh. Dapat menjadi sarana pemecahan masalah bertambahnya penduduk di Pulau Jawa, Bali dan Lombok dengan memindahkan ke daerah-daerah pertanian baru di luar Jawa yang dibiayai oleh pemerintah (Swasono, 1985). Program transmigrasi yang di lakukan pemerintah tentunya sangat membantu bagi masyarakat berada di daerah terpencil, yang tidak memiliki lapangan pekerjaan dan menyebabkan keadaan ekonomi masyarakat menjadi sulit. program transmigrasi ini tidak ada kriteria khusus, pemerintah memperbolehkan seluruh masyarakatnya mengikuti transmigrasi, dimana program transmigrasi memang ditujukan bagi seluruh masyarakat Indonesia terkhususnya masyarakat Pulau Jawa yang padat penduduknya untuk dipindahkan ke pulau pulau lain, salah satunya yaitu Pulau Sumatera.

Pemograman transmigrasi ini tentunya memberikan harapan yang diinginkan oleh masyarakat dengan melakukan transmigrasi salah satunya adalah tersedianya lapangan pekerjaan sehingga dapat mengangkat derajat kondisi ekonomi menjadi lebih baik dari sebelumnya. terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat jawa melakukan transmigrasi ke daerah Sumatera adalah faktor ekonomi, tersedianya lapangan pekerjaan, serta keadaan tanah yang subur di daerah Sumatera. namun yang menjadi alasan utama masyarakat jawa mengapa melakukan transmigrasi ke daerah Sumatera adalah faktor ekonomi serta jumlah penduduknya yang masih sedikit, dan memiliki tanah yang subur untuk kegiatan pertanian dan perkebunan.

Kondisi ekonomi masyarakat Jawa pada saat itu sangat ironis dan memprihatinkan. bagaimana tidak, untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka sulit, semakin kedepan kebutuhan yang dibutuhkan semakin meningkat, bukan hanya kebutuhan sandang, pangan, dan papan saja yang harus dipenuhi, tetapi kebutuhan lainnya juga harus terpenuhi seperti, kebutuhan sampingan yang tetap selalu ada. hal ini dikarenakan setiap kebutuhan di kendalikan oleh perekonomian, jika ekonomi suatu keluarga tidak stabil maka akan berakibat keluarga tersebut sulit untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan serta menghambat segala aktifitas yang ada pada keluarga tersebut.

Kondisi ekonomi yang demikian, membuat masyarakat hanya bisa pasrah dan berserah diri di tambah lagi lapangan pekerjaan yang sulit di cari. mayoritas mereka bekerja tidak memiliki penghasilan tetap, dan rata – rata pekerjaan dari masyarakat jawa adalah bertani. mereka bertani sawah di lahan milik orang lain di karenakan masyarakat jawa tidak semua memiliki lahan pribadi, sehingga hasil panennya di bagi dengan pemilik lahan.

Peluang untuk bisa kerja di daerah jawa sangat sulit didapat, tidak tersedianya lowongan pekerjaan bagi masyarakat yang ingin bekerja, sementara kebutuhan semakin hari makin maningkat. Penduduk masyarakat jawa yang padat, membuat persaingan menjadi ketat, ada masyarakat yang bekerja sebagai pedagang sayuran di pasar namun jumlah pedagang tidak sebanyak jumlah buruh tani yang menjadi pekerjaan dominan masyarakat Jawa.

Oleh karena itu, mereka mengikuti program transmigrasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengubah kondisi ekonomi kearah yang lebih baik. Pelaksanaan transmigrasi mencapai perkembangan di masa pemerintahan Orde Baru, sejak di pemberlakuan periodisasi pembangunan lima tahun (Pelita) yang di mulai dari Pelita 1 hingga pelita 6 (1969 - 1999). Pelita I diawali sejak tanggal 1 April tahun 1969 pelaksanaan pada pelita ini meletakkan sasaran pada pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan pekerjaan, serta kesejahteraan masyarakat di bidang kerohanian dan kebijakan pemerintah menitik beratkan pada upaya pembangunan pedesaan. dalam pelita 1 terdapat tiga jenis transmigrasi di antaranya adalah: Transmigrasi Umum, Transmigrasi Spontan atau Swakarsa, Transmigrasi ABRI.

Transmigrasi Umum adalah transmigrasi yang seluruh pembiayaan ditanggung oleh pemerintah. Transmigrasi Spontan atau Swakarsa adalah transmigrasi yang pembiayaannya di tanggung sendiri atau adanya perusahaan yang menanggung atas persetujuan dari pemerintah. namun pemerintah tetap memberikan bantuan terhadap anggota transmigrasi spontan jika membutuhkan bantuan. selanjutnya Transmigrasi ABRI adalah transmigrasi yang hanya untuk para anggota ABRI, transmigrasi ini mendapat bantuan dari Departemen Hankam.

Selanjutnya adalah Pelita II diawali pada tanggal 1 April 1974 pelaksanaan pada pelita ini kalangan veteran dapat mengikuti pemograman transmigrasi. Kebijakan pemerintah dalam hal ini menitikberatkan pada Peningkatan produksi pada berbagai sektor tersebut melahirkan struktur perekonomian Indonesia menjadi lebih kuat, dan bermanfaat sebagai landasan pembangunan di tahap selanjutnya. kemudian salah satu dampak yang dihadirkan adalah meluasnya lapangan pekerjaan. periode ini sudah mulai dirintis transmigrasi tanaman lain diluar pangan, tanaman perkebunan (PIR) dan tanaman keras (HTI). Pelaksanaan transmigrasi dalam hal ini pemerintah menggunakan pola "Bedol Desa" yaitu penyelenggaraan transmigrasi yang melibatkan penanganan fungsional tiap-tiap instansi yang terkait dengan proyek transmigrasi.

Pelita III secara resmi dimulai pada 1 April 1979 yang menitik beratkan pada segi pemerataan dengan berlandaskan trilogi pembangunan serta meningkatkan modal dan agribisnis. Dalam hal ini didirikan sebuah badan yang menangani koordinasi pelaksanaan transmigrasi yaitu Badan Koordinasi Transmigrasi (Bakotrans). Pada masa ini pula dimulai pelaksanaan transmigrasi pola PIR-Sus/NES, bekerjasama dengan perusahaan perkebunan, yang pelaksanaannya dirumuskan dalam Inpres Nomor 1 tahun 1986. PIR-Sus/NES dilaksanakan untuk komoditi kelapa sawit, coklat, karet dan teh. Proyek PIR-Sus/NES terkait dengan upaya pemerintah mencari pengganti ekspor untuk menghadapi turunnya harga minyak

Repelita IV diawali pada tanggal 1 April tahun 1984 yang terfokus pada berorientasi pada peningkatan kualitas permukiman Transmigrasi dan mengembangkan pola-pola usaha lain selain tanaman pangan, yaitu Hutan Tanaman Industri (HTI), PIR Perkebunan, Jasa Industri, Perikanan, Peternakan. Selain itu pemerintah juga menerapkan transmigrasi "sisipan" yaitu usaha menambah penduduk desa setempat di penempatan daerah transmigrasi yang memerlukan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya yang ada terkhusus di lahan pertanian dan perkebunan. Pelita V yang di mulai pada 1 April tahun 1989 difokuskan pada versifikasi ekonomi dalam rangka mengurangi ketergantungan akan minyak serta gas bumi dengan cara mengembangkan industri ekspor. Penerapan transmigrasi ini tidak hanya terfokus pada petani saja namun juga dengan pola usaha antara lain pola tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, industri dan jasa.

Pelita VI dimulai pada 1 April 1994 orientasi pelaksanaan diarahkan untuk pembangunan daerah, distribusi penduduk dan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan para Transmigran dan masyarakat pada umumnya, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. dengan hal ini terjadi kemunculan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) yang menjadikan sebagai alat alternatif yang mendukung pelaksanaan transmigrasi.

Program transmigrasi di masa ini selalu di jalankan dengan memindahkan puluhan ribu penduduk di setiap periodenya guna untuk pemertaan pembagunan dan pemerataan jumlah penduduk. Pembangunan Nasional di masa Orde Baru di kenal dengan Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Trilogi Pembangunan terdiri atas tiga aspek, berikut ini: pertama,

stabilitas nasional yang dinamis; kedua, pertumbuhan ekonomi yang tinggi; dan ketiga, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. seiring dengan perkembangan waktu, Trilogi Pembangunan berubah menjadi Mantra Pembangunan. Pada saat pertumbuhan mencapai tingkat tertinggi atau puncaknya, diharapkan akan berpengaruh secara trickle down pada pemerataan

Transmigrasi memegang peran yang sangat menentukan dan penting. Pemerintah Orde Baru menjadikan program transmigrasi sebagai prioritas dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional dasar presiden Soeharto pernah menyatakan bahwa transmigrasi merupakan program pemindahan penduduk terbesar dalam sejarah. "Program transmigrasi sungguh tidak ada bandingannya dan yang terbesar dari jenisnya dewasa ini di dunia. Sungguh, transmigrasi adalah program terbesar dari jenisnya dalam sejarah modern yang melibatkan satu bangsa dalam perpindahan sukarela karena alasan-alasan perdamaian, ekonomi dan kemanusiaan." disampaikan pada pidato pertanggung jawaban Mandataris pada Sidang Umum MPR 1 Maret 1983. besarnya perhatian pemerintah Orde Baru terhadap pemograman transmigrasi ini guna untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Pada tahun 1988 masyarakat yang berasal dari Jawa dan Lampung mengikuti pemograman transmigrasi ke daerah Riau. alasan Mereka mengikuti transmigrasi ke daerah Riau disebabkan karena beberapa alasan, salah satunya adalah mereka tidak memiliki lapangan pekerjaan serta tidak memiliki lahan dan rumah sendiri. Selama ini mereka menempati lahan milik Negara yang sejatinya tidak akan pernah menjadi hak milik masyarakat.

Masyarakat yang berasal dari daerah Jawa dan Lampung rata rata mereka bertani padi, dan sayur sayuran. Namun dikarenakan kondisi ekonomi mereka yang memburuk dan tidak ada perkembangan, serta masyarakat Lampung yang menempati lahan hutan lindung milik negara yang tidak akan pernah menjadi milik masyarakat menyebabkan mereka harus meninggalkan daerah asal mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pada tahun 1988 mereka memutuskan untuk mengikuti program transmigrasi kembali dengan harapan ingin merubah nasib kehidupan mereka kearah lebih baik, salah daerah penempatan transmigrasi tahun 1988 berada di Riau salah satunya desa Mukti Sari.

Pemberangkatan pertama para transmigrasi di mulai tahun 1988 dengan menggunakan armada bus yang telah di sediakan oleh pemerintah, seluruh kebutuhan pokok telah di persiapkan matang oleh pemerintah, para anggota transmigrasi hanya membawa anggota keluarga mereka untuk pindah ke daerah transmigrasi dan memulai kehidupan baru di daerah penempatan transmigrasi. Pemberangkatan pertama para transmigrasi di mulai pada bulan Maret tahun 1988 dengan jumlah 210 kepala keluarga sesampainya di Pekanbaru mereka diistirahatkan sembari menunggu bus lainnya yang membawa anggota transmigrasi yang berasal dari beberapa daerah lain.

Tempat peristirahatan mereka sebuah gedung yang berada daerah pekanbaru tepatnya berada di jalan Ronggo Warsito, selama berada di tempat peristirahatan mereka di berikan bahan makanan oleh pemerintah, setelah semua berkumpul mereka di berangkatkan kembali untuk menuju ke daerah penempatan yaitu desa Mukti Sari. sesampainya di lokasi para anggota transmigrasi secara berkelompok di berikan arahan kembali oleh para pengurus transmigrasi agar menempati rumah yang telah di sediakan oleh pemerintah, mereka masing masing di berikan kupon untuk mengambil nomor rumah yang mereka tempati nantinya. kedatangan masyarakat transmigrasi di desa Mukti Sari di laksanakan secara bertahap melalui beberapa kelompok.

Faktor yang mempengaruhi masyarakat transmigrasi lebih memilih desa ini adalah desa Mukti Sari pada awal kedatangan masyarakat transmigrasi hanya memiliki beberapa penduduk bersuku talang mamak dengan jumlah yang masih sedikit sehingga membuat masih tersedianya lahan yang luas untuk masyarakat transmigrasi bercocok tanam nantinya

Tanah luas di daerah desa Mukti Sari banyak yang dapat di olah menjadi lahan pertanian ataupun lahan Perkebunan, kondisi ini membuat pemerintah berharap masyarakat bisa hidup lebih baik di daerah transmigrasi ini. dan sumber daya alam yang melimpah tentunya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat transmigrasi jika mereka mampu mengolahnya dengan baik pula. Fasilitas

yang berikan dahulu oleh pemerintah tidak sepenuhnya memang apa adanya namun hal ini merupakan modal awal bagi masyarakat transmigrasi untuk mereka bisa memperbaiki kehidupan di masa yang akan datang.

Masuknya masyarakat transmigrasi ke desa Mukti Sari di lakukan pada tahun 1988. masyarakat transmigrasi yang berada di desa Mukti Sari merupakan masyarakat yang mayoritas berasal dari daerah Lampung, dan Sebagian berasal dari daerah Jambi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa barat, Yogyakarta. Saat kedatangan mereka, pemerintah sudah menyiapkan perumahan untuk mereka tempati. para transmigran yang datang di bagi atas 6 kelompok. mereka di datangkan mulai dari bulan Maret hingga November. Berikut adalah tabel urutan dan jumlah kelompok warga transmigrasi.

Tabel 1. Jumlah Kelompok Warga Transmigrasi

Kel. 1	Tanggal	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Daerah Asal
1	01 Maret 1988	55	230	Lampung
2	09 April 1988	45	172	Jawa Timur
3	19 May 1988	30	140	Jawa Tengah
4	03 Juli 1988	35	165	Yogyakarta
5	11 Agustus 1988	20	78	Jawa Barat
6	21 November 1988	25	90	Jakarta
Jumlah		210	875	

(Sumber: Arsip KK Tahun 1988: Kantor Desa Mukti Sari)

Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa para transmigran datang ke desa Mukti Sari tidak secara bersamaan melainkan mereka datang secara berkelompok. Mereka datang serentak di tahun yang sama pada 1988 dengan jumlah jiwa 875. dan jumlah Kepala Keluarga yang di turunkan secara langsung ke daerah transmigrasi tidak di tetapkan jumlahnya setiap bulannya bisa saja sampai 5 kelompok yang datang ke daerah transmigrasi. Pada tahun 1991 desa Mukti Sari menjadi tempat para transmigrasi sisipan yang berasal dari daerah Jawa timur sebanyak 10 Kepala Keluarga dengan jumlah jiwa sebanyak 60.

Tahun 1990 pernah terjadi pemindahan penduduk yang mengikuti transmigrasi di desa Mukti Sari hal ini di sebabkan karena adanya persetujuan antara pihak Perusahaan PT Caltex dengan masyarakat dengan alasan rumah yang mereka tempati berdekatan dengan sumur minyak milik PT Caltex sehingga membuat Pihak Perusahaan PT Caltex memindahkan masyarakat tersebut ke daerah yang jauh dari sumur minyak, dan masyarakat transmigrasi yang di pindahkan menempati desa Tri Manunggal yang letaknya tidak jauh dari desa Mukti Sari. Akibat dari hal ini menimbulkan berkurangnya jumlah penduduk di desa Mukti Sari. transmigrasi Desa Mukti Sari termasuk ke pada jenis transmigrasi PIR dan transmigrasi Lokal. transmigrasi pola PIR adalah salah satu program dari pemerintahan Orde Baru. Transmigrasi masa pemerintahan Orde Baru di jadikan sebagai prioritas utama dengan tujuan untuk mensukseskan Pembangunan Nasional dasar yang kemudian disesuaikan dengan pola umum pembangunan jangka Panjang.

Kemunculan dari awal keberadaan transmigrasi dengan pola PIR ini berasal dari kebijakan yang di keluarkan pemerintah dalam menunjang perkembangan perkebunan secara cepat atau sering dinamakan sebagai oil farming system for rural socioeconomic development dan melahirkan program bernama perkebunan inti-rakyat (PIR) atau dikenal NES (Nucleus Estate and Smallholders Project). dalam hal ini pemerintah orde baru bekerja sama dengan World Bank, Asian Development Bank (ADB), Germany Government Donor Agency (KfW) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD) untuk mendapatkan dana guna kelancaran pelaksanaan transmigrasi dengan pola NES atau transmigrasi PIR.

Pelaksanaan dari proyek ini terjadi pada tahun 1980 hingga tahun 1990 dengan melakukan kolaborasi antara pemerintah Indonesia ataupun dari pihak luar Negeri. Sehingga nantinya akan melahirkan definisi inti (Perusahaan) yang bermitra dengan petani (Plasma). Maka oleh sebab itu pemerintah membentuk suatu perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan perkebunan kepala

sawit milik masyarakat bernama PTPN (PT Perkebunan Nusantara). terdapat juga perusahaan swasta yang bergerak di bidang yang sama namun masih dalam naungan pemerintah. PIR merupakan model perkebunan kelapa sawit yang lahir dari sinergi antara petani dan perusahaan. Peranan inti (perusahaan) adalah mengelola perkebunan milik masyarakat guna untuk meningkatkan standarisasi hidup petani serta memberikan pengarahan melalui pembinaan bagaimana cara pengolahan kebun yang baik, dan masyarakat sebagai pemilik lahan / kebun.

Pada awal penempatan Masyarakat yang mengikuti transmigrasi mereka diberikan lahan dan rumah oleh pemerintah seluas 2,5 ha. Tanah 2,5 ha terdiri dari: 2 hektar lahan sawit, 0,5 sebagai perumahan dan sebagai tanah pekarangan. namun masyarakat belum mengetahui rumah dan lahan yang mereka tempati milik siapa dan rumah tersebut akankah menjadi milik masyarakat nantinya. untuk penyelesaian permasalahan ini masyarakat melakukan musyawarah dengan pemerintah, sehingga menghasilkan Keputusan bahwa rumah serta pekarangan seluas 0,5 hektar dan lahan seluas 2 hektar menjadi milik masyarakat dengan ketentuan masyarakat harus mengganti rugi kepada pemerintah sebesar Rp. 18. 300.000 (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah). keputusan ini sudah di sepakati antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat transmigrasi menyanggupi hal tersebut dan pelunasan hutang masyarakat kepada pemerintah di tahun 2003, pembayaran hutang tersebut dilakukan melalui ketua kelompok tani bekerja sama dengan KUD desa Mukti Sari dan di pertanggung jawabkan oleh kepala desa yang mengelola keuangan dari hasil produksi kelapa sawit milik masyarakat.

Lahan yang sudah ditanami bibit kelapa sawit seluas 2,5 ha yang telah di berikan oleh pemerintah, masyarakat tidak mampu menanggung biaya perawatan, pemupukan, serta penyemprotan untuk bibit kelapa sawit, di keranakan penghasilan masyarakat yang belum menentu, serta kondisi Perkebunan sawit milik masyarakat yang belum menghasilkan, dan keterbatasan pemahaman masyarakat terkait perawatan lahan Perkebunan kelapa sawit yang telah di berikan oleh pemerintah kepada masyarakat transmigrasi, maka oleh karena itu pemerintah mencari cara untuk mengatasi permasalahan ini agar masyarakat tetap bertahan di daerah penempatan transmigrasi. dan pemerintah menemukan cara menyelesaikan permasalahan ini yaitu dengan melakukan kerja sama oleh pihak luar dan membentuk Perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan serta mampu mengelola Perkebunan milik masyarakat, yang nantinya bentuk kerja sama ini membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan dapat memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat.

A. Awal Pembentukan kebun Plasma

Plasma di rancang oleh pemerintah orde baru dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar perkebunan yang nantinya mereka akan menikmati hasil kebun dan dapat mengangkat perekonomian. Pembangunan kebun plasma juga dapat dikatakan sebagai bentuk perhatian pemerintah ataupun perusahaan terhadap warga transmigrasi ataupun warga lokal. pasalnya jika pemerintah ataupun perusahaan hanya memberikan bantuan bibit tanpa biaya produksi untuk melakukan perawatan maka masyarakat akan merasakan kesulitan biaya produksi perawatan perkebunan yang sejatinya jumlah biaya tersebut tidak sedikit.

Kemunculan dari pembangunan kebun plasma atau kebun masyarakat yang terinspirasi dari model sel biologis, yang dimana sebuah sel memiliki dua bagian yaitu inti dan plasma yang masing – masing memiliki peranan penting. dengan skema kemitraan, perusahaan di jadikan sebagai “Inti” dan petani di jadikan sebagai sebagai “Plasma”. Pembangunan dari kebun plasma ini memiliki beberapa tujuan di antaranya adalah: 1. Secara umum pembanguan kebun plasma merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka meningkatkan ekonomi serta taraf hidup masyarakat melalui sektor perkebunan. 2. Secara khusus, pembangunan kebun plasma yang di laksanakan oleh PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) adalah membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar kebun milik perusahaan, hal tersebut untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang belum mempunyai kebun plasma.

Adapun bentuk pola pembangunan kebun plasma adalah sebagai berikut: 1.Pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat) : a.PIR BUN (Perkebunan Inti Rakyat Kebun), b. PIR Khusus (Perkebunan

Inti Rakyat Khusus), c.PIR Trans (Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi). 2. Pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota): a. SKIM PNM / Bank Agro, b.SKIM Bank Mandiri.

Perkebunan plasma sejatinya mendukung serta mendorong perekonomian masyarakat setempat ke arah yang lebih baik. dengan adanya perusahaan pada perkebunan plasma membuat tersedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk menghindari terjadinya pengangguran. Hal ini sebagaimana telah di sampaikan oleh Kepala Desa pertama Mukti Sari dalam wawancaranya saat Peneliti berkunjung ke desa Mukti Sari, yakni: Hasil wawancara dengan bapak sukirno selaku kepala desa pertama di desa Mukti Sari

“keberadaan perusahaan milik pemerintah ataupun perusahaan swasta yang berada di bawah naungan pemerintah (perkebunan plasma) tentunya memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap masyarakat terkhusus dalam bidang perekonomian, saya sendiri merasakan hal tersebut, dahulu pada awal penempatan saya sendiri belum mampu untuk merawat lahan yang di berikan pemerintah, untung saja ada perkebunan plasma milik pemerintah (PTPN) yang dapat membantu serta mengelola perkebunan milik masyarakat.”

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan perkebunan plasma sangat memberikan peluang bagi masyarakat untuk mereka memperbaiki keadaan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan sehingga meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat setempat serta membuka lapangan pekerjaan sehingga meningkatkan kesejahteraan dan daya beli terhadap hasil perkebunan masyarakat setempat.

Masyarakat menyerahkan lahan mereka kepada pemerintah daerah setempat (Camat) untuk di bangun kebun kelapa sawit plasma, alasan masyarakat melakukan hal ini adalah karena terkendala biaya perawatan lahan. Lahan yang di serahkan oleh masyarakat adalah lahan yang tidak dalam keadaan sengketa atau dalam tanggungan bank. Selanjutnya pemerintah setempat (Camat) menyampaikan usulan pembangunan kebun kepada Manajer Distrik. Atas usulan tersebut Manajer Distrik bekerja sama dengan Manager kebun untuk melakukan berbagai kegiatan diantaranya adalah: 1. Evaluasi kelayakan lahan yaitu: evaluasi lahan tersedia dengan jumlah calon petani harus di seimbangkan. Atas lahan yang di serahkan masyarakat di lakukan evaluasi yaitu: membandingkan lahan yang tersedia dengan jumlah calon petani yang telah disetujui pemerintah daerah setempat, sehingga tidak terjadi tuntutan dari masyarakat di kemudian hari. 2. Pemetaan dan pengukuran lahan rencana kebun inti dan plasma. Berdasarkan surat pernyataan lahan untuk kebun plasma dari masyarakat, dilakukan pemetaan dan pengukuran lahan yang diperuntukkan Kebun Inti dan Kebun Plasma.

Calon petani peserta diprioritaskan warga masyarakat yang menyerahkan lahan dan bertempat tinggal di sekitar kebun serta telah berusia 20 tahun dan sudah menikah. Calon petani peserta di seleksi oleh pemerintah daerah setempat (Kepala Dusun, Kepala Desa, Camat), dengan persyaratan yang meliputi kelengkapan serta keabsahan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, serta Pasphoto yang bersangkutan.

Koperasi unit desa (KUD) / Koperasi Perkebunan (Kopbun) adalah sebuah usaha koperasi yang sudah berbadan hukum yang akan meawadahi petani peserta yang akan menyerahkan lahan sebagai anggota KUD / Kopbun. KUD / Kopbun berfungsi sebagai penanggung jawab atas hasil perkebunan masyarakat. KUD juga dapat diartikan sebagai suatu pilar dari pengembangan perekonomian pedesaan karna KUD adalah wadah bagi petani untuk memenuhi pengadaan sarana produksi pertanian, permodalan, serta pemasaran hasil dari perkebunan yang dapat menyongsong perekonomian masyarakat setempat. KUD juga mempunyai peran yang sangat penting terhadap kesejahteraan masyarakat desa yaitu sebagai lembaga pelayanan desa yang dituntut untuk menampung, mengembangkan serta membina berbagai usaha yang di lakukan oleh para anggotanya secara efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan yang telah di tetapkan KUD dapat tercapai dengan sempurna.

B. Bentuk kerja sama petani Plasma dengan KUD, serta Perusahaan

Program pembangunan perkebunan melalui pola perkebunan inti rakyat (PIR – Trans) didasarkan pada Kepres No. 1 Tahun 1986 dengan tujuan meningkatkan produksi non migas, meningkatkan pendapatan petani, membantu pengembangan wilayah serta menunjang pengembangan perkebunan, meningkatkan dan memberdayakan koperasi (KUD) di wilayah plasma. Perusahaan pertanian berfungsi sebagai (Inti) dan sedangkan pekebun / petani berfungsi sebagai (plasma). keduanya memiliki peranan penting masing – masing, serta terjalin hubungan kerja sama untuk bermitra, saling membutuhkan, dan menguntungkan sesama lainnya. Pola hubungan kemitraan yang di lakukan petani dengan perusahaan dilakukan dalam bentuk partisipasi sebagai anggota KUD.

Matualage mendefisikan bahwa kemitraan adalah suatu bentuk usaha untuk menjalin kerja sama antara UKM (Usaha Kecil Menengah) dengan badan usaha yang besar dan di sertai dengan adanya pembinaan sekaligus pengembangan yang berasaskan pada sifat saling perlu, saling menguatkan, serta saling mnguntungkan tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan. Sebelum lahan petani plasma menghasilkan, pihak perusahaan (Inti) menanggung seluruh biaya operasional perawatan lahan petani hingga sampai menghasilkan buah. Setelah lahan tersebut memberikan tanaman menghasilkan (Tm) maka pihak perusahaan membebaskan biaya operasional kepada petani plasma. dan pihak KUD bertugas membagikan hasil tanaman kepada anggota/petani berdasarkan luas kebun yang dimiliki masing masing desa.

Selanjutnya KUD membuat perjanjian dengan pihak PTPN, sebagai pihak yang melakukan pembayaran hutang atas biaya operasional perkebunan. dan biaya pembangunan kebun akan dikembalikan kepada petani jika sawit mereka sudah menghasilkan. dan hasil sawit milik petani seluruhnya di setor kepada pihak PTPN sebesar 70%. Lalu petani mendapatkan hasil bersih sebesar 30%. Harga dari kelapa sawit tidak di tentukan oleh perorangan melainkan berdasarkan pada tim yang di bentuk oleh pemerintah setempat mengikuti harga pasar sehingga petani tidak merasa dirugikan. Hal ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pihak PTPTN untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Sehingga dengan adanya pembangunan ini diharapkan adanya kemajuan perekonomian yang cukup pesat. Pendapatan para petani tidak dapat di tentukan karena harga hasil kelapa sawit dari lahan mereka mengikuti harga pasar yang sifatnya berubah- ubah. Jika hasil produksi kelapa sawit tinggi maka pendapatan petani pun akan meningkat.

Peningkatan Perekonomian Masyarakat Transmigrasi di Desa Mukti Sari (1988 – 2023)

Peningkatan perekonomian diartikan sebagai proses meningkatnya kualitas hidup masyarakat, tidak hanya melalui peningkatan pendapatan, tetapi juga melalui berbagai perubahan yang lebih luas dalam struktur ekonomi dan sosial suatu negara. Peningkatan perekonomian dalam masyarakat dapat dikatakan berkembang apabila pendapatan perkapita masyarakat menunjukkan kecenderungan dalam jangka panjang naik. Pendapatan ekonomi masyarakat tentunya sangat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. dalam hal ini peningkatan perekonomian masyarakat juga mempengaruhi terhadap aspek kehidupan masyarakat seperti: bidang sosial budaya, pendidikan, serta kesehatan. Jika pendapatan masyarakat meningkat disetiap tahunnya maka kehidupan masyarakat tersebut akan terjamin. Berikut adalah pendapatan masyarakat transmigrasi Desa Mukti Sari.

Mata pencarian masyarakat transmigrasi desa Mukti Sari rata rata bekerja sebagai karyawan di PTPN IV. Perusahaan PTPN IV memiliki peranan penting terhadap perkembangan perekonomian masyarakat transmigrasi di desa Mukti Sari. Selain sebagai pengelola PTPN juga menampung hasil perkebunan sawit milik masyarakat. dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, PTPN juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa Mukti Sari. Pemilihan masyarakat sebagai anggota karyawan yang bekerja pada kantor perusahaan PTPN IV di lakukan dengan cara penyeleksian, dilihat dari pendidikan, umur, kesehatan, serta pengalaman dalam dunia kerja.

Berdasarkan data wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa karyawan yang bekerja di Perusahaan PTPN IV adalah orang orang terpilih yang mempunyai skil dan pengetahuan yang lebih

di bandingkan dengan masyarakat lainnya. Oleh sebab itu pendapatan masyarakat yang bekerja di PTPN lebih besar di bandingkan dengan masyarakat yang hanya bekerja di kebun plasma. Namaun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan keberadaan PTPN memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.

Pihak PTPN juga memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat setempat, yang mana dalam aspek ekonomi perusahaan berorientasi untuk mendapatkan keuntungan (Profit). Sedangkan bagi masyarakat desa Mukti Sari perusahaan PTPN memberi lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar untuk menanggulangi angka pengangguran serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa Mukti Sari setiap tahunnya.

Masyarakat sekitar yang bekerja sebagai karyawan di PTPN dari tahun 1988- 2023. Yang mana pada pendapatan awal dari tahun 1988 para karyawan yang bekerja di perusahaan PTPN IV di berikan gaji sebesar Rp. 750.000,00 estimasi pendapatan pertahunnya adalah 125.000,00. Sehingga di tahun 2023 pendapatan karyawan yang bekerja di PTPN IV meningkat menjadi Rp. 4.300.000,00. Sehingga Pendapatan estimasi per lima tahunnya sekitar Rp.625.000,00. Adapun pendapatan masyarakat desa Mukti Sari dari 1988 – 2023 sebagai berikut.

Tabel 2. Rata-Rata Pendapatan karyawan PTPN IV Per Lima tahun

No	Tahun	Pendapatan
1	1988 - 1993	Rp. 1.375.000,00
2	1994 - 1999	Rp. 2.000.000,00
3	2000 – 2005	Rp. 2.625.000,00
4	2006 - 2011	Rp. 3.250.000,00
5	2012 – 2017	Rp. 3.875.000,00
6	2018 - 2023	Rp. 4.300.000,00

(Sumber: hasil wawancara manajer keuangan perusahaan PTPN IV).

Desa Mukti Sari adalah salah satu kawasan penempatan transmigrasi di tahun 1988, yang dimana masyarakatnya sebagian besar bekerja sebagai petani plasma diperkebunan dengan naungan perusahaan PTPN. Dengan adanya PTPN IV yang memberikan bantuan berupa dana serta kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh petani untuk perkembangan perkebunan kelapa sawit yang masyarakat miliki. Selain itu pihak masyarakat menjual hasil perkebunan mereka kepada pihak PTPN IV sesuai dengan harga pasar yang telah ditetapkan, tidak hanya itu pihak PTPN juga mendapatkan persenan dari hasil penjualan kelapa sawit sebesar 30% untuk pembiayaan perawatan kebun masyarakat oleh pihak perusahaan dan masyarakat hanya menerima sekitar 70% dari hasil perkebunan kelapa sawit. Pembagian pendapatan hasil produksi kelapa sawit milik masyarakat di bagikan oleh KUD Mekar Jaya desa Mukti Sari yang selanjutnya di bagikan oleh masyarakat yang di potong hutang pembangunan kepada perusahaan inti (PTPN IV) atas pembiayaan perawatan, biaya panen, biaya pupuk, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat sekitar yang bekerja sebagai petani Plasma di perkebunan PTPN dari tahun 1988- 2023. yang mana pada pendapatan awal di tahun 1988 memperoleh pendapatan sekitar Rp. 250.000,00 serta pendapatan pertahunnya mengalami peningkatan sebesar Rp. 40.000,00 pertahunnya. Pendapatan estimasi per lima tahunnya sekitar Rp.200.000,00. Adapun pendapatan masyarakat yang bekerja sebagai petani plasma di desa Mukti Sari dari 1988 – 2023 sebagai berikut

Tabel 3. Rata-Rata Pendapatan karyawan PTPN IV Per Lima tahun

No	Tahun	Pendapatan
----	-------	------------

1	1988 - 1993	Rp. 450.000,00
2	1994 - 1999	Rp. 650.000,00
3	2000 – 2005	Rp. 850.000,00
4	2006 - 2011	Rp. 1.050.000,00
5	2012 – 2017	Rp. 1.250.000,00
6	2018 - 2023	Rp. 1.500.000,00

(Sumber: hasil wawancara manajer keuangan perusahaan PTPN IV).

Peningkatan perekonomian masyarakat transmigrasi tidak hanya dapat dilihat dari aspek pendapatan saja, namun juga dapat dilihat dari aspek lainnya seperti: sosial budaya, pendidikan, serta kesehatan. Peningkatan perekonomian masyarakat jika hanya dilihat dari aspek pendapatan maka hal ini tidak dapat menjadi tolak ukur seberapa besar tingkat kesejahteraan masyarakat terdapat beberapa aspek lainnya yang dapat menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat transmigrasi di antaranya adalah sebagai berikut:

A. Bidang Pendidikan

Pendidikan adalah hal terpenting dalam perkembangan perekonomian masyarakat. Pendidikan akan selalu mengalami kemajuan dan perkembangan setiap tahunnya. Peranan pendidikan tentunya sangat penting terhadap perkembangan perekonomian masyarakat, jika pendapatan perekonomian dalam masyarakat meningkat maka akan mempengaruhi tingkat pendidikan masyarakat itu sendiri. Pendidikan diperlukan bagi kehidupan manusia. Pendidikan terjadi sepanjang hidup dan terjadi dalam 3 jalur yakni pendidikan formal, pendidikan non-formal dan pendidikan informal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang harus diselesaikan di sekolah wajib yang ditunjuk oleh pemerintah. Adapun pendidikan non-formal adalah pendidikan yang diperoleh melalui ceramah dan informasi ilmu yang diberikan oleh orang tertentu. Sedangkan pendidikan informal merupakan pendidikan yang biasa dilaksanakan dalam lingkungan keluarga.

Faktor pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam Era pembangunan saat ini berkualitasnya mutu pendidikan masyarakat akan membawa dampak sangat penting diterapkan kepada masyarakat untuk dapat menjadi masyarakat yang handal dan berkualitas. Pendidikan juga dapat dijadikan sebagai suatu dasar yang penting dalam kehidupan masyarakat karena pendidikan dapat di jadikan salah satu landasan untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam melakukan tugas dan fungsinya, baik kemampuan berfikir maupun kemampuan berperilaku dan sebagainya. Adapun data di bidang pendidikan berdasarkan tahun 2024 yaitu pada tingkat : SD (247), SMP(104), SMA (1485), dan Perguruan Tinggi (238).

B. Bidang Pendapatan

Pendapatan yang lebih tinggi dalam suatu masyarakat dapat berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Ini karena masyarakat yang lebih sejahtera cenderung memiliki akses yang lebih baik ke pelayanan kesehatan dan dapat membuat pilihan gaya hidup yang lebih sehat. dalam hal ini masyarakat desa Mukti Sari untuk mendapatkan layanan kesehatan melalui puskesmas yang telah di bangun oleh pemerintah desa. masyarakat desa Mukti Sari mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dari petugas puskesmas, jika mereka berkeinginan lebih memilih melakukan pengobatan di Rumah Sakit, masyarakat di berikan surat rujukan agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Hal ini terjadi terhadap masyarakat yang memiliki pendapatan yang tinggi di bandingkan dengan masyarakat lainnya

C. Bidang Sosial – Budaya

Masyarakat dengan pendapatan lebih tinggi cenderung memiliki daya beli yang lebih besar dan dapat memenuhi lebih banyak kebutuhan, termasuk barang-barang mewah dan hiburan. Kehidupan Masyarakat Dasa Mukti mayoritas mereka sudah berkembang, kehidupan mereka saat ini sama seperti kehidupan masyarakat kota. Namun dalam hal ini masyarakat masih menerapkan sikap gotong royong antar sesama warga tanpa membedakan ras, etnik, dan budaya, masing – masing Masyarakat Desa Mukti Sari masih menerapkan kebudayaan yang mereka miliki yang berasal dari nenek moyangnya.

Dampak Program Desa Energi Berdikari Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Mukti Sari

Pemanfaatan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar merupakan suatu bentuk tantangan bagi masyarakat selaku makhluk sosial. Karena dengan adanya pemanfaatan sumber daya alam yang baik akan mengantarkan masyarakat menuju peningkatan kehidupan yang baik dan dapat meningkatkan derajat perekonomian. Pemanfaatan sumber daya alam berbasis lokal adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan guna untuk mengurangi dampak lingkungan terhadap kehidupan, serta meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan skill dan pengetahuan yang dimiliki dalam mengolah sumber daya lokal yang ada. Maka oleh karena itu melihat kondisi masyarakat sekitar, pihak Pertamina menemukan suatu inovasi yang memanfaatkan sumber daya lokal yang ada sehingga memunculkan “Desa Energi Berdikari (DEB).”

Pihak Pertamina mengembangkan energi bersih sebagai wujud sikap kepedulian terhadap masyarakat sekitar, dengan memanfaatkan lima jenis energi terbarukan yaitu: pembangkit listrik tenaga surya, gas metana dan biogas, mikro hidro, biodiesel serta energi hybrid dari energi surya dan angin. Fajar Djoko Santoso selaku pimpinan Pertamina mengemukakan bahwa Pemograman DEB adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan untuk mendukung ketahanan energi dengan energi terbarukan, serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

Peranan DEB sangat memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan DEB dapat dijadikan sebagai suatu solusi terhadap permasalahan tingginya penggunaan energi dalam lingkungan masyarakat. Dalam pelaksanaan pemograman DEB pihak Pertamina bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk saling berkolaborasi, yang nantinya kegiatan kolaborasi ini akan membuka jalan untuk pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian yang berkelanjutan.

Desa Mukti Sari adalah salah satu desa energi berdikari berbasis biogas, pelaksanaan program ini dilakukan oleh pihak PT Pertamina Rokan Hulu – Wk Rokan (PT PHR) bekerja sama dengan Yayasan Rumah Energi (YRE) yang berada di Desa Mukti Sari dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan (TJSL). Awal kemunculan dari pemograman ini di latarbelakangi oleh kondisi ekonomi masyarakat yang masih belum berkembang. Oleh karenanya muncul suatu gagasan bagaimana cara meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara memanfaatkan kotoran limbah hewan atau tumbuhan sebagai bahan dasar pembuatan biogas. Program DEB ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi energi yang terbarukan, yaitu biogas.

PT.PHR Bersama dengan YRE (Yayasan Rumah Energi) selalu mengupayakan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan pasar biogas melalui sosialisasi dan edukasi, serta pemanfaatan biogas sebagai teknologi alternatif untuk keperluan memasak, penguatan komunitas, serta pengembangan produk turunan biogas berupa *bio-slurry* untuk digunakan sebagai pupuk dalam pertanian berkelanjutan dan praktik ekonomi sirkuler. Proram DEB dilaksanakan melalui kemitraan yang dilakukan antara PT PHR Bersama dengan YRE di tahun 2022. Program ini hadir untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya limbah yang ada di lingkungan sekitar menjadi sebuah energi baru bersifat terbarukan. Melalui pendampingan, pengetahuan serta fasilitas yang mendukung membuat masyarakat setempat percaya bahwasannya pemanfaatan biogas ini bisa menjadi alternatif sumber energi pengganti atau terbarukan yang memanfaatkan sumber daya alam lokal di lingkungan sekitar.

Pemanfaatan limbah ini dapat digunakan untuk produksi biogas sehingga jumlah limbah yang dibuang ke lingkungan berkurang secara signifikan, dan mengurangi risiko pencemaran air dan tanah. Konsep peternakan dengan sistem pengolahan limbah yang baik, apalagi dengan memanfaatkan limbah sebagai biogas dapat memberikan efek yang sangat baik dalam menjaga keberlangsungan energi. Bau yang tidak sedap dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan sekitar peternakan.

Hal ini sebagaimana telah disampaikan oleh kepala Desa Mukti Sari yaitu: hasil wawancara dengan bapak Waryono: “*kehadiran DEB di desa Mukti Sari memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat sekitar, kerja sama yang dibangun antara pihak Pertamina dengan*

masyarakat memberikan perubahan yang signifikan terhadap lingkungan sekitar. Pemanfaatan limbah dari hasil peternakan milik masyarakat yang diubah menjadi biogas tentunya mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan di desa Mukti Sari. Serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.”

Dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa pemanfaatan limbah akibat dari kegiatan masyarakat tentunya dapat dipergunakan kembali untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Salah satunya adalah pemanfaatan biogas dari limbah kotoran makhluk hidup. Masyarakat sangat menyukai biogas karena instalasi dan penggunaan biogas yang praktis serta perawatan yang mudah dapat memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan dengan biogas itu sendiri. Penempatan penampungan limbah kotoran sapi yang kemudian dijadikan bahan baku biogas sangat dekat dengan area peternakan, sehingga pemanfaatan waktu dalam mengisi ulang biogas dapat dilakukan dengan efisien, dan juga masyarakat di Desa Mukti Sari saat ini telah berkomitmen dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pengisian biogas dengan bahan baku limbah ternak, hal ini dikarenakan mereka telah mempercayai dengan penuh terhadap pemanfaatan biogas yang dilakukan secara konsisten mampu memberikan kontribusi terhadap upaya menciptakan energi alternatif biogas.

Sebagai bentuk strategi keberlanjutan Program DEB secara mandiri oleh komunitas lokal, dalam kurun waktu 4 bulan menghasilkan kelompok komunitas pengguna biogas bernama “biotama agung Lestari”. Adapun asal dari kata “Biotama” adalah berasal dari kata biogas pertamina dan masyarakat. Sedangkan arti kata “Agung” adalah besar atau mewah. Sementara “Lestari” di artikan sebagai berkelanjutan. Melalui pengembangan kelompok Biotama Agung Lestari ini perekonomian masyarakat yang tergabung dalam kelompok dapat meningkat karena terjadi penganekaragaman sumber pendapatan bulanan. Kendala yang dirasakan sangat melakukan pengembangan kelompok biotama agung Lestari salah satunya adalah tingkat kesadaran penduduk akan peduli terhadap lingkungan masih sangat sedikit. Dengan adanya kendala yang demikian tidak menutup kemungkinan kelompok masyarakat Biotama Agung Lestari untuk terus mengembangkan energi biogas menjadi penting dalam rangka membentuk serta memperkuat kemandirian dalam memenuhi kebutuhan energi di masa yang akan datang.

Pendekatan ekonomi sirkuler dalam mengembangkan program DEB menjadi titik utama dalam menyokong keberlanjutan program oleh para masyarakat penerima biogas dan mengembangkan desa Mukti Sari sebagai desa yang berdikari sebagai sumber energinya. Saat ini desa Mukti Sari telah bertransformasi menjadi percontohan Desa Energi Berdikari berbasis biogas berkat inisiatif dan partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal. Masyarakat Mukti Sari memanfaatkan limbah ternak untuk menghasilkan biogas serta mengembangkan rantai nilai ekonomi yang muncul dari usaha pupuk organik oleh kelompok Biotama Agung Lestari. Kelompok ini memproduksi pupuk organik berbahan baku ampas biogas yang ramah lingkungan untuk dipasarkan secara masif dan mandiri, sehingga tumbuh ekonomi baru di desa yang dapat meningkatkan pendapatan para penerima manfaat kelompok biogas. Adapun Dampak yang diberikan dengan adanya pemograman energi biogas terhadap masyarakat desa Mukti Sari adalah sebagai berikut.

A. Pendidikan

Pemograman DEB yang dilakukan oleh pertamina memberikan manfaat kepada masyarakat, akan pentingnya lingkungan yang bersih dan tidak tercemar. Masyarakat diberikan pengarahan oleh pihak pertamina bagaimana cara mengelola limbah yang ada di lingkungan sekitar mereka untuk dijadikan sebagai biogas yang ramah lingkungan. Tentunya hal ini dapat menambah wawasan masyarakat akan pentingnya lingkungan yang bersih tanpa tercemar limbah akibat dari aktifitas masyarakat tersebut, sehingga dapat menimbulkan kesadaran kepada masyarakat bahwa limbah yang selama ini tidak mereka gunakan, akan bermanfaat bagi kehidupan mereka jika diolah dengan sebaik mungkin.

B. Lingkungan

Pengembangan dari adanya program DEB memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Pemakaian energi terbarukan tentunya dapat mengurangi sikap ketergantungan terhadap energi fosil yang menyebabkan polusi udara dan pencemaran lingkungan. Program DEB mendorong pengelolaan limbah secara berkelanjutan Energi terbarukan tidak menghasilkan polusi udara seperti yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil dan juga membantu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil (BBM dan LPG) yang berdampak positif terhadap lingkungan.

C. Kesehatan

Program Desa Energi Berdikari (DEB) memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat. berkurangnya paparan polusi udara dari penggunaan energi fosil, seperti bensin dan LPG, yang sering digunakan di desa-desa yang belum terjangkau listrik. Penggunaan energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, atau biogas, dalam program DEB membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan polutan lain, sehingga meningkatkan kualitas udara dan mengurangi risiko penyakit pernapasan dan penyakit terkait polusi.

D. Sosial - Ekonomi

Program Desa Energi Berdikari (DEB) mendorong peningkatan akses energi bersih, yang pada gilirannya menciptakan berbagai peluang bagi peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi Akses energi bersih melalui DEB memungkinkan masyarakat pedesaan untuk menikmati kualitas hidup yang lebih baik, misalnya melalui penggunaan listrik yang lebih efisien dan aman untuk kegiatan sehari-hari. DEB mendorong peningkatan perekonomian desa melalui berbagai kegiatan yang memanfaatkan energi terbarukan, seperti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis energi bersih, menciptakan lapangan kerja baru di daerah pedesaan, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterampilan teknis atau pengelolaan usaha.

PENUTUP

Sejarah kehidupan masyarakat transmigrasi akan selalu berkaitan dengan faktor pendorong dari daerah asal mereka (Jawa) serta faktor penarik dari daerah transmigrasi. Ada beberapa faktor yang mendorong masyarakat Jawa untuk bertransmigrasi yaitu sulitnya lapangan pekerjaan di daerah asal mereka. dan yang menjadi faktor penarik dari daerah transmigrasi adalah tersedianya lapangan pekerjaan, sehingga membuat masyarakat melakukan transmigrasi dengan harapan mendapatkan kehidupan yang baik dan layak. Sejarah kehidupan masyarakat transmigrasi di mulai dari mereka datang ke Desa Mukti Sari hingga mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Sehingga Desa Mukti Sari mendapat pandangan dan respon yang baik dari masyarakat luar, di bandingkan dengan desa desa lainnya yang berada dekat dengan Desa Mukti Sari.

Perkembangan perekonomian masyarakat transmigrasi mengalami perkembangan yang sangat pesat akibat dari adanya perusahaan milik pemerintah (PTPN IV) peranan dari perusahaan ini memberikan perubahan perekonomian masyarakat sekitar, akibat dari adanya kerja sama antara masyarakat dengan perusahaan. Selain karna peranan perusahaan, perkembangan perekonomian masyarakat transmigrasi di Desa Mukti Sari juga tidak terlepas dari peranan KUD (koperasi unit desa) yang berhasil mengembangkan potensi yang ada di dalam masyarakat desa. sehingga menyebabkan pendapatan perekonomian masyarakat meningkat. Saat ini Desa Mukti Sari dijadikan sebagai desa energi berdikari berbasis biogas, hal ini terjadi akibat adanya bentuk kerja sama antara pihak perusahaan Pertamina dengan masyarakat sekitar sebagai bentuk sikap kepedulian terhadap lingkungan.

Peranan program DEB selain memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan pentingnya lingkungan bersih, juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, masyarakat diberikan lapangan pekerjaan, serta cara pengolahan limbah yang sudah tidak berguna yang kemudian diolah menjadi biogas oleh pihak Pertamina. DEB mendorong peningkatan perekonomian desa melalui berbagai kegiatan yang memanfaatkan energi terbarukan, seperti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis energi bersih, menciptakan lapangan kerja baru di daerah pedesaan, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterampilan teknis atau pengelolaan usaha

DAFTAR PUSTAKA

ARSIP

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu Dalam Angka 1997
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu Dalam Angka 1988
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar 1999
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar 1999
Badan Pusat Statistik, Kabupaten Kerinci Dalam Angka 2010
Badan Pusat Statistik, Kecamatan Tapung Dalam Angka 2024

BUKU

- A. Daliman. (2012). *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Ombak. Hlm 83-86
AB Yass, Marzuki. 2004. *Metodologi Sejarah dan Historiografi*. Diklat. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Hlm 35
Abdurahman, D. Op.Cit. Hlm. 73
Achsini, M. Z., & Rosalinda, H. (2021). *Teori-Teori Migrasi Internasional*. Universitas Brawijaya Press. Hlm 35
Arifin Noor, Ilmu Sosial Dasar untuk IAIN Semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2007), Hlm 22
Bahrein T. Sugihan, *Sosiologi Pedesaan: suatu pengantar*, Hlm 146
D.W. Hadi, G. Kasuma, *Propaganda Orde Baru 1966-1980*, Media Verleden. 1 (2012) Hlm 41.
Dadang Solihin, S. E. (2021). *Administrasi Pembangunan*. Jakad MediaPublishing. Hlm 5
Dahlan, M. H. (2014). *Perpindahan Penduduk Dalam Tiga Masa : Kolonisasi, Kokuminggakari, dan Transmigrasi*. Patanjala, Hlm 335–337.
Darsana, I. M., & SE, M. (2023). *Sejarah Ilmu Ekonomi*. Pengantar Ilmu Ekonomi, Hlm13.
Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers:2009), Hlm 2
Derani, S. (2011). *Metode Sejarah Ibn Khaldun*. Buletin Al-Turas, 17(1), Hlm 61-86.
Direktorat Jenderal Perkebunan et.al, *Petunjuk Bersama Pelaksanaan Transmigrasi Swakarsa PIR-Perkebunan (PIR-Khusus dan PIR-Berbantuan/NES)*, (Jakarta, 1986).
Dudung Abdurrahman. 2011. "Metodologi Penelitian Sejarah Islam". Yogyakarta: Ombak. Hlm: 114.
Fathoni, A. (2006). *Metodelogi penelitian*. Jakarta: rineka cipta.Hlm 5
Firdaus, M dan Susanto, A. 2002. *Perkoperasian (Sejarah, Teori dan Praktek)*. Ghalia Indonesia, Bogor. Hlm 273- 274.
Hamidy, U. (1992). *Perantau Jawa di Daerah Riau (Cet.1)*. Pekanbaru: UIR Press. Hlm 23
Herimanto. 2008. *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.Hlm 163
Herlina, Nina. op,cit. hlm: 21
Hernanto, 1994. *Ilmu Usahatani*. Jakarta. Penebar Swadaya, Hlm 56.
Ir. Pandiadi, dkk. *Transmigrasi Pola Perkebunan Perlu Revitalisasi Kebijakan*. (Jakarta: Bangkit Daya Insana, 2008)
Juhairiyah. *Sarana dan Prasarana Pendidikan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012. Hlm 61
Laksono, Anton Dwi. op.cit. Hlm: 106
M.P. Todaro, *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga*, Erlangga, 1988. Hlm 97.
Majid, R. (2021). *Dasar Kependudukan*. Penerbit Nem., Hlm 35
Mantra IB. 1995. *Mobilitas Penduduk Sirkuler dari Desa ke Kota di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada. Hlm 1-2
Mukhtazar. *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020) Hlm.73
N. Daldjoeni. 1980. *Masalah penduduk dalam fakta dan angka*. Bandung. Alumni, Hlm 190
Naim,Mochtar,1979. *Merantau, Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press. Hlm 278
Nina Herlina, *Metode Sejarah*. (Bandung: Satya Historika 2020),hlm 24

- Palupi, S. Dkk, *Privatisasi transmigrasi dan kegiatan plasma*. Penerbit The Institute for Ecosoc Rights, Jakarta, Indonesia, Hlm 81-86
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Hlm 242
- R.K. H, *Transmigrasi Harapan dan Tantangan*, Departemen Transmigrasi, Jakarta, 1993. Hlm 54
- Raho, B. (2016). *Sosiologi*. Hlm 5
- S.E. Swasono, M. Singarimbun, *Sepuluh windhu transmigrasi di Indonesia, 1905-1985*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, 1985. Hlm 108
- Sjamsuddin. *Metodologi Sejarah*, (Jakarta: PPTA Ditjen Dikti Depdikbud RI, 1996). Hlm. 104
- Soekartawi, 2010. *Ilmu Usahatani dan Penelitian Untuk Pengembangan Petani Kecil*. Jakarta: Universitas Indonesia. Hlm 77
- Suhartono W. Pranoto. 2010. *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu hlm 95
- Supriyanto, E. BAB 1 *Konsep Dasar Teori Ekonomi*. Ekonomi Dasar: Pemahaman Konsep, 1. Hlm 37- 39
- Tilaar, H.A.R. 2001. *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hlm: 5
- Warsito, R. (2014). *Transmigrasi dari daerah asal sampai benturan budaya ditempat permukiman*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 146
- Wasino, M., & Endah Sri, H. (2018). *Metode Penelitian Sejarah: dari Riset hingga Penulisan*. Hlm 11
- Yin, Robert K, (2006), (Terj), *Studi Kasus, Desain dan Metode*, Jakarta, Rajawali Press. Hlm 103
- Yusuf, Munir. 2018. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Palopo: IAIN Palopo. Hlm: 3.
- Zubaedi, M. A. (2016). *Pengembangan masyarakat: wacana dan praktik*. Kencana. Hlm 4.
- JURNAL
- Anggraeni, M., Ramaida, R., & Samsiah, S. (2023). Penamaan desa di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Sajak: *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Sastra, Bahasa, dan Pendidikan*, 2(1), Hlm 6 -7.
- Anggraini, O., & Hamid, A. (2024). Perkembangan Ekonomi Masyarakat Transmigrasi Desa Air Terang Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol. Jurpis: *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 2 1(1), Hlm 47
- Bakce, Riati. 2020. "Analisis Perkembangan Jumlah Penduduk Dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pekanbaru". *Jurnal Menara Ilmu*. Vol. 14, No. 2. 139-149. Hlm: 141.
- Dadang Solihin, S. E. (2021). Administrasi Pembangunan. *Jakad Media Publishing*. Hlm 5
- Darayani, B. A. Y. T. F., & Harahap, I. Hubungan Antara Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi Terhadap Laju Pertumbuhan Penduduk di Indonesia. Hlm 433-434
- Girsang, P., Daswir, M., & Wahyono, T. (1995). Pengembangan perkebunan kelapa sawit pola PIR LOK dan pengaruhnya terhadap pengembangan wilayah. *Warta Pusat Penelitian Kelapa Sawit*, 3(1), Hlm 39-42.
- Hambarsari, D. P., & Inggit, K. (2016). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Timur Tahun 2004-2014. 1 (2), 257-282. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, Hlm 269.
- Hendrarto, I. C. (2020). Transmigrasi Rahasia Di Balik Pengembangan Wilayah: Belajar dari Riau dan Sulawesi Barat. *Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi*. Hlm 38
- Langumadi, W. A. (2017). Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Transmigrasi di UPT Arongo Desa Persiapan Bosenga Indah Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi, Universitas Halu Oleo, Vol. 1 No.*
- Legiani, W. H., Lestari, R. Y., & Haryono, H. (2018). Transmigrasi dan pembangunan di Indonesia. *Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika*, 4(1), 25-38.
- Mantra, I. D. 1985. *Pengantar Studi Demografi*. Yogyakarta: Nur Cahaya. Hlm 83
- Matualage, Amestina. Dkk. 2019. Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit dalam Pola Kemitraan Inti Plasma PTPN II Prafi dengan Petani Suku Arfak di Manokwari, Papua Barat. *JSEP Vol. 12, No. 1 Hlm : 19-22*

- Matus, D. A. (2016). Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Tingkat Pendidikan Orang Tua Serta Disiplin Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa SMA Negeri di Bangkalan. *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan*, 4(2), Hlm 138.
- Moniharapon, D., Jaya, I., Manik, H., Pujiyati, S., Hestirianoto, T., & Syahailatua, A. (2014). Migrasi vertikal zooplankton di Laut Banda. *Jurnal Kelautan Nasional*, 9(3), Hlm 145.
- Nugroho, S., & Pitoyo, A. J. (2017). Arus Migrasi Risen di Indonesia Tahun 1980–2010. *Jurnal Bumi Indonesia*, 6(4). Hlm 2
- Nurkholis, S. B. (2007). Perkembangan Hubungan Antar Sektor Dan Antar Daerah Dalam Perekonomian Indonesia: Analisa Model Interregional Input-Output Tahun 1995 Dan 2005. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Hlm 35- 61.
- Paramita, D., Handayani, K. U., & Harahap, R. N. (2024). Mempromosikan Efisiensi Sumber Daya Melalui Eco-Lokalisme: Analisis Keberlanjutan Desa Energi Berdikari Berbasis Biogas. *Jurnal Aplikasi dan Inovasi Iptek*, 6(1), Hlm 8- 10.
- Putra, P. (2019). Strategi dan Bentuk-bentuk Informasi Transmigrasi pada Masa orde baru dalam rangka mensukseskan program pembangunan nasional. *Jurnal Kepustakawanan Dan Masyarakat Membaca*, 35(2), Hlm 13-15
- Qomariya, F. N., Soetarto, H., & Alfiyah, N. I. (2021). Migrasi Dalam Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Talango. *Public Corner*, 16(1), Hlm. 80
- Sasioba, J. B. (2018). Perkembangan Masyarakat Transmigrasi di Desa Bantik Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 1983-2015. *Jurnal Elektronik Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi*, 1(1).
- Subiyakto, R. (2021). Evaluation Of The Development Of The Pamulutan Transmigration Area, Ogan Ilir Regency, South Sumatra, Indonesia. *International Journal Of Environmental Science*, Hlm 6.
- Thahir, dkk. 2023. "The Impacts of Management Capacity on the Implementation of Merdeka Belajar Kampus Merdeka Policy in Higher Education". *Indonesian Research Journal in Education*. Vol. 7, No. 1. 316-329. Hlm: 318.
- Tjiptoherijanto, P. (1996). Kependudukan dan Transmigrasi dalam Perspektif Pembangunan Nasional. *Ekonomi Dan Keuangan Indonesia*, 44(4), Hlm 356
- Tjiptoherijanto, P. (1999). Urbanisasi dan pengembangan kota di Indonesia. *Populasi*, 10(2), Hlm 58
- Village, B. (2024). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAAP). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAAP)*, 3(1).

Website

- Dirjen Pkppt. (2015). Transmigrasi Masa Doeloe, Kini Dan Harapan Kedepan. <https://ditjenpkp2trans.kemendesa.go.id/ResoUrces/Files/A2e27404a080382134857e7ef4874c6f.Pdf> Di Akses Pada 03 April 2025, Pukul 10.00 Wib.
- Resourcesasia.id. Energi Berdikari Phr Ciptakan Sirkular Ekonomi Warga Mukti Sari Kampar. <https://resourcesasia.id/Energi-Berdikari-Phr-Ciptakan-Sirkular-Ekonomi-Warga-Mukti-Sari-Kampar>. Di Akses Pada Minggu 23 Maret 2025
- Sejarah Desa Mukti Sari Kecamatan Kampar. <https://ld.desa.mukti.sari-tapung.desa.id>. Di Akses Pada 27 Februari 2024
- Ternate.Tribun News.Com Pt Gmm Dorong Pembangunan Kebun Plasma di Halmahera Selatan. <https://gmm-id.co.id/Pt-Gmm-Dorong-Pembangunan-Kebun-Plasma-Di-Halmahera-Selatan>. Di Akses Pada Minggu, 27 April 2025 Pukul 12.00 Wib.
- Universitas Pertamina. Com Peresmian Desa Energi Berdikari Sobat Bumi Uper Sebagai Solusi Energi Alternatif . www.universitaspertamina.ac.id/Berita/Detail/Peresmian-Desa-Energi-Berdikari-Sobat-Bumi-Uper-Sebagai-Solusi-Energi-Alternatif Di Akses Pada 03 Maret 2025

Wawancara

Wawancara dengan bapak Agus Winarno selaku masyarakat transmigrasi pada Sabtu 08 Februari 2025

Wawancara dengan bapak Jumpono selaku masyarakat transmigrasi pada, Minggu 02 Februari 2025.

Wawancara dengan bapak Panto selaku masyarakat transmigrasi pada Senin, 03 Februari 2025

Wawancara dengan bapak Sitam Ar selaku masyarakat transmigrasi, pada Senin 17 Maret 2025

Wawancara dengan bapak Sukirno, pada Senin 10 Februari 2025

Wawancara dengan bapak Sunarto selaku masyarakat transmigrasi, pada Selasa 11 Februari 2025

Wawancara Dengan Bapak Waryono Selaku Kepala Desa Mukti Sari Pada Selasa 18 Maret 2025.

Wawancara dengan ibu Sumarni selaku masyarakat transmigrasi pada Kamis 06 februari 2025

Wawancara Hasan Main selaku Manager Kompos DEB Mukti Sari, Pada Jumat 21 Maret 2025.

Wawancara Heri Prasetyo, S.E Salah Satu Pegawai Kantor Desa, Pada Jumat 21 Maret 2025